

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi berhasil guna. Efektif berarti dapat mencapai sasaran atau dapat menghasilkan sesuatu yang telah ditentukan. Sedangkan efektivitas adalah keadaan berhasilnya mencapai sasaran. Sebagai kata benda, efektivitas berarti keberhasilan mencapai sasaran yang sungguh-sungguh berguna. Karena itu efektivitas dapat disebut juga berhasil guna.

Emerson dalam Handyaningrat (1996 : 5) mengatakan bahwa : "*Effectiveness is a measurring interm of attaining prescribed goal or objectives*" (efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya).

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya maka dapat dikatakan efektif, namun apabila suatu tujuan atau sasaran tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka dapat dikatakan tidak efektif.

Selanjutnya, Siagian (1997 : 20) mengatakan : " Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya " .

Hal ini juga mengandung arti bahwa efektivitas sebagai efisiensi kerja menyertai 4 (empat) hal sebagai berikut :

1. Sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang digunakan setelah ditentukan dan dibatasi.
2. Jumlah dan mutu barang atau jasa yang harus dihasilkan setelah ditentukan.
3. Batas waktu untuk mencapai barang atau jasa tersebut sudah ditentukan.
4. Tata cara yang harus ditempuh untuk menghasilkan tugas yang sudah dirumuskan.

Lebih rinci, Sedarmayanti (1995 : 62) mengungkapkan bahwa : “ Efektivitas berkaitan dengan pencapaian kerja yang maksimal dan berkaitan dengan tenaga kerja yang mencakup kualitas, kuantitas, dan waktu “.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah menyangkut pencapaian tujuan, efektivitas mengandung pengertian tercapainya tujuan ataupun sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga dengan demikian efektivitas erat kaitannya dengan keberhasilan pencapaian suatu tujuan atau sasaran.

B. Pembangunan

Pembangunan menurut Dadang Solihin (2002:111) ”Suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya, kemajuan teknologi, dan memperhatikan perkembangan global”.

Munir (2002:24) memberikan pengertian pembangunan ”sebagai suatu perubahan dan merupakan sesuatu yang semestinya terjadi dalam suatu masyarakat, baik masyarakat maju maupun masyarakat yang sedang berkembang”.

Zulkarnain Nasution (1996:27) memberikan gambaran umum tentang pembangunan menurut para ahli sebagai berikut :

1. Inayatullah (1967) : Perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri.
2. Kleijans (1975) : Pada akhirnya bukanlah soal teknologi atau GNP, tetapi pencapaian pengetahuan dan ketrampilan baru, tumbuhnya suatu kesadaran baru, perluasan wawasan manusia, meningkatnya wawasan manusia, dan meningkatnya semangat kemanusiaan, serta suntikan kepercayaan diri.
3. Rogers (1983) : Suatu proses perubahan sosial dengan partisipasi yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material termasuk bertambah besarnya keadilan kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Menurut Zulkarnain Nasution (1996:28) terdapat tujuan-tujuan dan proyek dalam pembangunan yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Umum (*goals*) adalah proyeksi terjauh dari harapan-harapan dan ide-ide manusia, komponen dari yang terbaik yang mungkin, atau masyarakat ideal terbaik yang dapat dibayangkan.
2. Tujuan khusus (*objectives*) adalah tujuan jangka pendek, biasanya yang dipilih sebagai tingkat pencapaian sasaran dari suatu proyek tertentu.

Sedangkan target pembangunan adalah tujuan-tujuan yang di rumuskan secara konkret, dipertimbangkan rasional dan dapat direalisasikan sebatas teknologi dan sumber-sumber yang tersedia, yang ditegakkan sebagai aspirasi antara suatu situasi yang ada dengan tujuan akhir pembangunan.

Pembangunan erat kaitannya dengan perubahan sosial dan kebudayaan, pembangunan membawa perubahan dalam diri manusia, masyarakat dan lingkungan hidupnya, oleh karena itu jelaslah bahwa kebudayaan dan perubahan sosial merupakan unsur penting dalam pembangunan. Sehubungan dengan itu Riant Nugroho (2001:73) memberikan pengertian pembangunan sebagai :

Perubahan sosial besar-besaran dan direncanakan. Pembangunan adalah perubahan sosial yang direncanakan dan dipercepat, yang alami dan bertahap akan menghasilkan masyarakat yang lebih kuat dan berdaya karena masyarakat tersebut memiliki cukup waktu untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Terlebih jika perubahan tersebut terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang.

Sedangkan Siagian (1994:2) memberikan enam pokok yang terdapat dalam batasan pembangunan yang dikemukakannya :

1. Bahwa pembangunan merupakan usaha atau suatu proses, berarti suatu kegiatan yang terus menerus dilakukan.
2. Bahwa pembangunan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar, jika ada kegiatan yang kelihatannya nampak seperti pembangunan akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara insidental dimasyarakat, tidaklah dapat digolongkan kepada kategori pembangunan.
3. Bahwa pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.
4. Bahwa pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas disini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan kepada pihak lain.
5. Bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multidimensional. Artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara terutama aspek ke hidupan bangsa dan poleksosbudhankamnas dan administrasi.

6. Bahwa kesemua hal telah disebutkan dimuka ditujukan kepada membina bangsa (*national building*) yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara, Pembangunan sendiri mempunyai beberapa arti :

1. Pembangunan adalah suatu proses jangka panjang, yaitu pengertian yang holistik memandang pembangunan sebagai proses dalam jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan nasional.
2. Pembangunan adalah menghilangkan ketidak sempurnaan pasar, yaitu diartikan sebagai upaya untuk menghilangkan, atau paling tidak mengurangi kesempurnaan pasar (market imperfections) dari suatu perekonomian. Ketidaksempurnaan pasar adalah segala hambatan yang membuat pasar tidak dapat secara sempurna mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien.
3. Pembangunan adalah industrialisasi, menurut devinisi ini adalah upaya untuk mengatasi ciri-ciri pokok dari perekonomian yang keterbelakang, khususnya ketergantungan pada produksi bahan primer termasuk pertanian. Karena itu pembangunan dianggap identik dengan industrialisasi yang diperkuat oleh pengamatan bahwa negara-negara yang telah maju umumnya adalah negara industri.

Berdasarkan wacana dan pemaparan diatas penulis menyimpulkan bahwa Pembangunan adalah suatu bentuk proses atau kegiatan yang secara terus menerus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik melalui suatu perencanaan dan pelaksanaan yang baik pula sehingga hasilnya dapat dinikmati masyarakat banyak.

C. Tinjauan Program Gerakan Masyarakat Membangun (GEMMA) Tapis Berseri Kota Bandar Lampung

1. Tinjauan Tentang Program

Program adalah kumpulan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah (Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004). Program adalah kegiatan pokok yang akan dilaksanakan organisasi untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan (Suud, 2006: 60). Program adalah usaha-usaha jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan pada suatu sektor tertentu untuk mencapai beberapa proyek (*World Bank*). Program juga dapat dipahami sebagai, kegiatan sosial yang teratur, mempunyai tujuan jelas dan khusus, serta dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu. (Reksopoetranto, 1985: 77).

Berdasarkan beberapa defenisi program seperti yang tersebut diatas, penulis berkesimpulan bahwa program adalah kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan organsasi yang telah ditetapkan sebelumnya

2. Pengertian Program Gerakan Masyarakat Membangun (GEMMA) Tapis Berseri Kota Bandar Lampung

Pemerintah Kota Bandar Lampung mengembangkan suatu program gerakan masyarakat membangun (GEMMA) Tapis Berseri. Ini merupakan program yang berbasiskan pemberdayaan masyarakat guna mempercepat pembangunan infrastuktur dan pengembangan ekonomi kerakyatan di Kota Bandar Lampung. Program ini merupakan pelaksanaan dari peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung 2005-2010. Dan ini merupakan penerjemahan dari Undang-undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi.

Dalam hal perencanaannya pembangunan mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. perencanaan yang baik dalam pembangunan merupakan rancangan yang telah melalui tahap-tahap dalam perancangan pembangunan meliputi (penyusunan, penetapan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan rencana). Program itu sendiri sebenarnya merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi/satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat. kebijakan ini dilakukan melalui pemberi bantuan dana stimulan kepada masyarakat kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana lingkungan serta penyaluran kredit ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat golongan ekonomi lemah. Sebagai dana stimulan, masyarakat kelurahan diberikan kebebasan dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan serta didorong untuk berpartisipasi aktif melalui penyiapan swadaya masyarakat.

3. Maksud Program Gerakan Masyarakat Memebangun (GEMMA) Tapis Berseri Adalah :
 1. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dikelurahan dalam pembangunan daerah
 2. proses pembelajaran demokrasi dalam pembangunan.
 3. meningkatkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan
 4. meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam melaksanakan proses pembngunan
 5. mempercepat pembangunan sarana dan prasaran di kelurahan
 6. meningkatkan sumber daya manusia (SDM)
 7. meningkatkan penataan lingkungan yang sehat dan asri

8. menumbuhkan/menciptakan lapangan kerja baru dari kalangan tuna karya
 9. membangun usaha yang ada menjadi produktif
 10. meningkatkan produktifitas usaha yang sudah produktif
 11. meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penumbuhan dan peningkatan usaha ekonomi produktif
4. Tujuan Program Gerakan Masyarakat Memebangun (GEMMA) Tapis Berseri Adalah :
 - “ Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Bandar Lampung”
 5. Prinsip Kebijakan Program Gerakan Masyarakat Memebangun (GEMMA) Tapis Berseri
 1. **Akseptabel**, kegiatan tersebut dapat diterima dan didukung Masyarakat. Hal ini berlaku baik pada pemilihan lokasi dan penentu solusi teknis, penentu mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengadaan, maupun pada penentuan mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana kelurahan.
 2. **Transparan**, Penyelenggaraan kegiatan dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat.
 3. **Akuntabel**, penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan, dalam hal ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan waktu, ketepatan pembiayaan, dan ketepatan mutu pekerjaan.
 4. **Inisiatif**, bermakna bahwa kegitan-kegiatan yang dilaksanakan harus berasal dari usulan yang direncanakan oleh masyarakat kelurahan itu sendiri.
 5. **Partisipatif**, bahwa dalam proses pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan mengedepankan partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif baik secara pembiayaan, tenaga kerja, bahan material, maupun ide dan pemikiran, mulai dari perencanaan, serta pengawasan.

6. **Demokratis**, bahwa dalam penentu kegiatan yang akan direncanakan ditentukan dan diputuskan secara bersama baik ditingkat Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan.
7. **Manfaat**, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.
8. **Gotong royong**, bahwa pelaksanaan kegiatan yang direncanakan mampu mengedepankan rasa gotong royong dan kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat.
9. **Berkelanjutan**, bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat dipelihara, dan dilestarikan oleh masyarakat sendiri.

Untuk itu, dalam hal ini perlunya dibuat satuan kerja perangkat daerah (dalam hal ini perangkat kelurahan bersama dengan masyarakat). Unsur partisipatif dalam good governance terlihat jelas dalam hal penetapan organisasi pelaksana GEMMA ini. Dan itu sendiri sudah merupakan unsur yang harus ada mengingat adanya Peraturan Daerah Nomor 13 tentang Partipasi Masyarakat dalam Penyusunan APBD. Tetapi itu sajalah tidak cukup karena aspek-aspek lain dari good governance tidaklah kalah penting. Itu semua dilakukan agar timbulnya sinergi antara kepentingan masyarakat dan tugas pemerintah dalam memberikan kesejahteraan. Dalam hal ini dibentuklah Pengurus Kelompok Masyarakat (POKMAS) representasi dari masyarakat. Pokmas itu sendiri merupakan perangkat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Gemma Tapis Berseri di Kelurahan. Dan diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara jujur, adil, dan transparan baik dalam laporan maupun pelaksanaan.

6. Ruang Lingkup Efektivitas Organisasi

Organisasi bukan merupakan tujuan, tetapi alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu dikatakan organisasi adalah wadah kegiatan dari orang-orang yang bekerja sama dalam usaha pencapaian tujuan. Berhasil tidaknya tujuan yang akan dicapai tersebut sangat tergantung pada faktor manusianya. Sebagai alat, organisasi adalah satu-

satunya wadah yang memungkinkan banyak orang diatur dan didayagunakan secara fektif dan efisien. Alfred Kuhn (1976:342) sebagaimana dikemukakan oleh Sadu (1996:48) mengungkapkan lima tipe organisasi pemerintah, meliputi :

1. tipe organisasi kerja sama/kooperatif
2. tipe organisasi pencari keuntungan
3. tipe organisasi pelayanan
4. tipe organisasi penekan
5. tipe organisasi kombinasi.

Organisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah karena untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah dengan baik suatu daerah harus dapat atau mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sebagai akibatnya maka diperlukan organisasi yang baik pula. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Josef Riwu Kaho dalam *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* (2003:232) yaitu ia mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah. Riwu mengatakan: “Agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik, dalam arti daerah dapat/mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri-sendiri, maka diperlukan adanya organisasi manajemen yang baik pula.”

Perkembangan organisasi dapat dipelajari dengan menggunakan 4 macam pendekatan, yaitu pendekatan klasik, pendekatan tingkah laku, pendekatan struktur dan pendekatan sistem, Hasibuan (2001:77). Sedangkan Stephen.P.Robbins (1994:58) mengungkapkan empat pendekatan dalam mengukur efektivitas, yaitu:

1. Pendekatan Pencapaian Tujuan
2. Pendekatan Sistem;
3. Pendekatan Konstituensi-Strategis dan
4. Pendekatan Nilai-nilai bersaing.

Karena pendekatan pencapaian tujuan merupakan kriteria yang paling banyak digunakan untuk menentukan efektivitas maka penulis menggunakan pendekatan pencapaian tujuan sebagai indikator dalam mengukur atau menilai suatu keefektifan organisasi.

Taliziduhu Ndraha (2003:238) menyatakan bahwa: “Pembicaraan tentang efektivitas bermula pada wacana tentang tujuan organisasi”. Senada dengan pernyataan tersebut dikemukakan oleh Warren dan Dennis dalam Taliziduhu Ndraha (2003:238) sekurang-kurangnya ada lima hal yang menunjukkan pentingnya tujuan organisasional (*organizational goals*), yaitu:

- Pertama*, tujuan organisasional melegitimasi peranan organisasi di tengah-tengah lingkungan dan mendudukkannya pada posisi tertentu.
- Kedua*, tujuan organisasi berfungsi sebagai daya tarik guna mengundang atau memancing dukungan lingkungan dan perhatian masyarakat.
- Ketiga*, tujuan organisasional memberi arah bagi kegiatan organisasi.
- Keempat*, erat dengan butir tiga, berfungsi sebagai tolak ukur unjuk kerja (kinerja) organisasi, alat ukur buat kontrol dan evaluasi kinerja organisasi
- Kelima*, tujuan organisasional berfungsi sebagai kekuatan penggerak dan tantangan bagi organisasi.

Bagi organisasi pemerintah daerah berkaitan erat dengan asas penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Salah satu asasnya, adalah desentralisasi mempunyai tujuan, untuk demokratisasi, efektivitas dan efisiensi serta keadilan. Sehingga efektivitas sebagai salah satu tujuan dari desentralisasi apabila dikaitkan dengan organisasi pemerintah atau sektor publik akan sangat dipengaruhi oleh tercapainya tujuan secara efektif. Efektif tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya dapat ditinjau dari berbagai sisi. Yang akan dibahas penulis pada penelitian ini adalah ketepatan pelaksanaan program dan struktur organisasinya.

Drucker dalam Hasibuan (2001:81) mengemukakan tiga jalan untuk menemukan struktur yang membantu pencapaian tujuan, yaitu analisis kegiatan, analisis keputusan dan analisis hubungan. Analisis kegiatan adalah mengemukakan pekerjaan

macam apa saja yang tergolong sama yang diberikan kepada setiap kegiatan di dalam struktur organisasi. Analisis keputusan ialah merancang suatu struktur organisasi, yang juga berkenaan dengan keputusan yang harus dibuat. Sedangkan analisis hubungan menerangkan bahwa dalam merancang struktur organisasi juga harus dirumuskan hubungan vertikal (atasan dengan bawahan) dan hubungan horizontal (hubungan ke samping atau sejajar).

Konsep efektivitas suatu organisasi menunjukkan adanya kesesuaian antara efektivitas itu sendiri dengan seberapa jauh organisasi dapat melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsinya sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan menggunakan alat-alat dan sumber daya yang ada secara optimal. Dengan demikian terdapat dua aspek yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas organisasi, yaitu tujuan dan pelaksanaan tugas atau cara mencapai tujuan tersebut.

Bila hal ini dikaitkan dengan struktur organisasi penyelenggara program Gemma Tapis Berseri maka efektivitasnya dapat diukur dari sejauhmana tingkat pencapaian tujuan ditinjau dari aspek Efektif. Sedangkan efektif yang penulis maksud ditinjau dari aspek pencapaian tujuan.

D. Kerangka Pikir

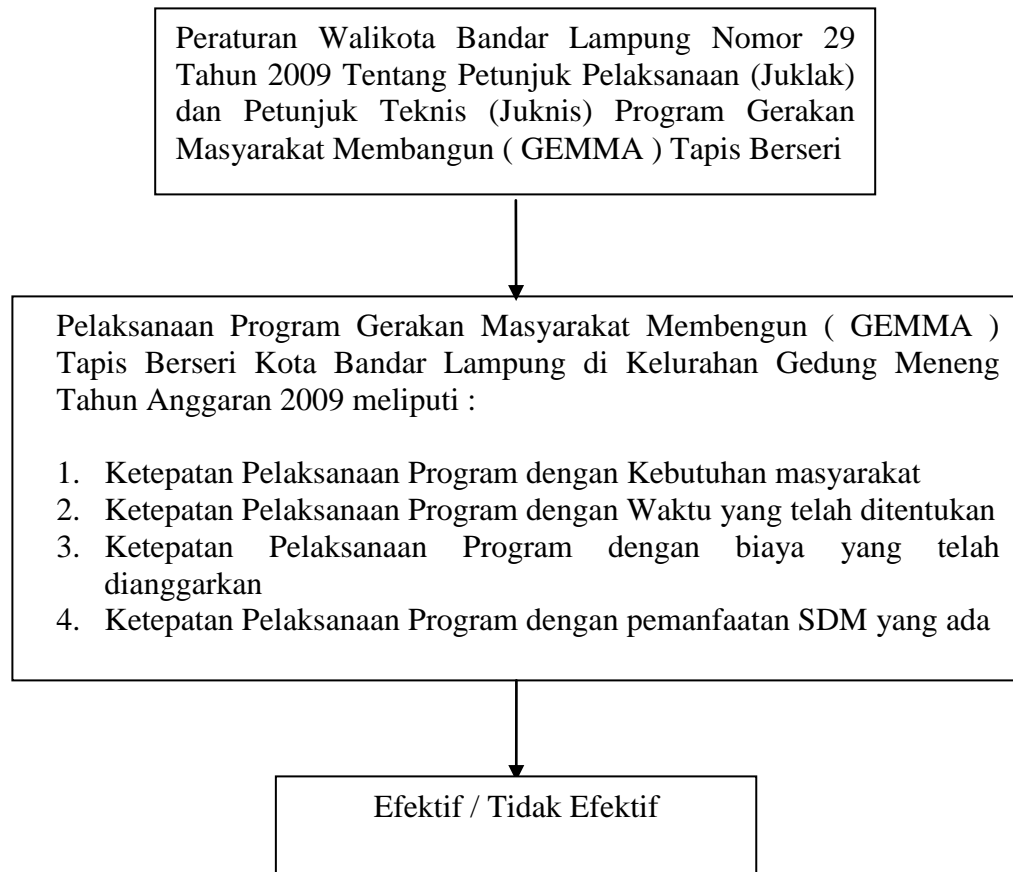
Kecendrungan selama era Orde Baru, dimana sosok pembuatan kebijakan publik (*public policy making*) lebih sarat diwarnai pola-pola sentralistik, tertutup dan otoritarian. Sehingga dijamin kebijakan publik itu akan tidak berjalan dengan baik dan efektif. Begitupun dengan proses pembangunan yang terjadi di Indonesia semuanya diatur oleh Pemerintah Pusat dan terus diamanatkan ke tingkat yang berada di bawahnya (*top down*).

Salah satu aspek yang sangat fundamental dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif dalam setiap proses pembangunan daerah dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga terkait dengan paradigma baru Pemerintahan, yang tidak lagi dominan melaksanakan proses pembangunan namun hanya bersifat katalisator dan fasilitator dalam proses pembangunan tetapi melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat (*bottom up*). Pelaksanaan pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat (*bottom up*) bertujuan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam setiap proses pembangunan daerah.

Kebijakan pembangunan di Bandar Lampung, menciptakan sebuah Program Gerakan Masyarakat Membangun (GEMMA) Tapis Berseri. Program Gerakan Masyarakat Membangun (GEMMA) Tapis Berseri berlangsung saat keluarnya Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis Program Gerakan Masyarakat Membangun Tapis Berseri Kota Bandar Lampung. Dan ini semua guna menerapkan kewenangan yang diberikan kepada daerah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Untuk dapat melihat Efektifitas Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Membangun (GEMMA) Tapis Berseri Kota Bandar Lampung di Kelurahan Gedung Meneng Tahun 2009, akan dilihat dari pelaksanaan program dengan kesesuaian petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) program Gerakan Masyarakat Membangun (GEMMA) Tapis Berseri Tahun Anggaran 2009.

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir Efektivitas Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Membangun (GEMMA) Tapis Berseri Kota Bandar Lampung di Kelurahan Gedung Meneng Tahun Anggaran 2009